



CARUT MARUT DATA SIREKAP KPU Ikut Skorsing Rekapitulasi di Kemantren

YOGYA (KR) - KPU Kota Yogya mengikuti langkah beberapa daerah lain di Indonesia yang melakukan skorsing atau penghentian sementara proses rekapitulasi suara di kemantren. Skorsing dilakukan sejak Senin (19/2) pukul 12.00 WIB hingga Rabu (20/2) hari ini.

Penghentian sementara rekapitulasi tingkat kemantren di Kota Yogya dituangkan melalui surat KPU Kota Yogya nomor 182/PL.01.8-SD/3471/2/2024 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Melalui surat yang ditandatangani Ketua KPU Kota Yogya Noor Harsya Aryosamudro itu, masing-masing Ketua PPK diminta memberitahukan ke setiap saksi, panwas kecamatan serta undangan lainnya perihal skorsing rekapitulasi di tingkat kemantren.

Saat dikonfirmasi, Harsya membenarkan keputusan penghentian sementara rekapitulasi di tingkat kemantren tersebut. Menurutnya, langkah itu diambil sebagai tindak lanjut rapat koordinasi yang difasilitasi oleh KPU DIY.

"Tadi (kemarin) kami diundang rapat dengan KPU DIY sampai pukul 10.00 WIB. Keputusannya untuk melakukan skorsing atau penghentian sementara proses yang ada di kemantren. Ini kaitannya dengan sinkronisasi data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang menjadi alat bantu bagi masyarakat dalam mengakses data secara transparan," jelasnya.

Dalam kurun beberapa waktu belakangan ini hasil pembacaan data Sirekap yang diunggah melalui laman pemilu2024.kpu.go.id memang tengah menjadi sorotan. Hal ini karena carut marut data Sirekap menjadikan publik atau masyarakat dibuat jengah lantaran banyak data yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi secara fisik. Warga bahkan ada yang menyampaikan aduan secara resmi ke KPU Kota Yogya agar diteruskan ke KPU RI selaku pihak yang mengoperasikan aplikasi tersebut. Warga

itu menilai, jika tidak diperbaiki secara masif justru menjadi pembodohan publik lantaran banyak data yang bodong.

Harsya juga tidak menampik bahwa penghentian sementara rekapitulasi di kemantren itu bagian dari optimalisasi aplikasi Sirekap oleh KPU RI. Sebelumnya sejumlah daerah di Indonesia juga ada yang melakukan skorsing rekapitulasi untuk tujuan yang sama.

"Memang ada beberapa elemen data yang ketika denter dalam sistem justru tidak sesuai dengan data fisik. Misal jumlah surat suara sekian dan yang digunakan sekian namun ketika denter ke Sirekap, yang muncul berubah. Makanya ini butuh sinkronisasi agar hak informasi publik bisa terjaga," tandasnya.

Meski diskorsing hingga hari ini, namun Harsya belum bisa memastikan untuk proses kelanjutan rekapitulasi di kemantren, apakah pagi, siang atau justru malam hari. Kendati demikian, dirinya menjamin proses rekapitulasi tidak akan dimulai dari awal lagi melainkan hanya melanjutkan sejak tahapan diskorsing. Apalagi batas waktu tahapan rekapitulasi di kemantren juga masih panjang yakni maksimal hingga 3 Maret 2024 mendatang.

Diketahui, hingga kemarin siang sudah ada dua kemantren yang sebenarnya telah menyelesaikan rekapitulasi yakni Mergangsan dan Danurejan. Kemudian tepat sebelum skorsing, rekapitulasi di Kemantren Pakualaman bahkan sudah tahap finalisasi untuk diselesaikan. Begitu juga banyak kemantren lainnya yang akan masuk dalam tahap finalisasi akhir. "Tetapi itu semua tidak akan dimulai dari awal. Nanti hanya melanjutkan saja setelah ada arahan dari KPU RI. Kami pun juga mengedepankan mitigasi dengan mengecek ulang data setelah direkap kemudian data yang diunggah ke Sirekap, begitu juga hasilnya ketika sudah diupload ke publik. Jadi ketika ada perbedaan langsung bisa diketahui untuk diperbaiki," urainya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005